



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Senin, 04 April 2016 06:00

Hari Ini Presiden Jokowi Resmi JMP



AMBON - Hari ini Presiden akan tiba dengan pesawat kepresidenan di Bandara Pattimura Ambon jam lima sore. Kedatangan Presiden untuk meresmikan Jembatan Merah Putih.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan Jembatan Merah Putih (JMP) di Kota Ambon, hari ini. Jadwal peresmian jembatan terpanjang di kawasan Indonesia Timur ini dimajukan lebih awal dari sebelumnya, Rabu (6/4).

Jembatan 1.400 meter ini merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikerjakan oleh Balai Jalan dan Jembatan di wilayah IX Maluku dan Maluku Utara sejak tahun 2011.

Jembatan yang menghubungkan Desa Galala dan Desa Poka Kota Ambon ini menelan dana APBN sebesar Rp 700 miliar.

Semula selain mengunjungi Kota Ambon, Presiden yang didampingi ibu Negara Iriana Joko Widodo akan mengunjungi Kota Tual dan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Akibat pembatalan itu rencana Presiden meresmikan sejumlah proyek Kementerian Perhubungan, batal. Proyek-proyek Kemenhub yang bersumber dari APBN itu yakni, Pelabuhan Tutu Kembong di Kabupaten MTB, Pelabuhan Wonreli (MBD), dan Pelabuhan Pulau Teor (SBT).

Rencana kedatangan Presiden dan rombongan ke Ambon disampaikan Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku, Bobby Palapia kepada Kabar Timur, kemarin. "Besok (hari ini) Presiden akan tiba dengan pesawat kepresidenan di Bandara Pattimura Ambon jam lima sore. Kedatangan Presiden untuk meresmikan Jembatan Merah Putih," ujar Palapia.

Dalam kunjungan kerjanya ke Ambon, Presiden juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono. Namun Basuki di Ambon lebih awal beberapa jam



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

sebelumnya. “Pak Menteri Basuki tiba lebih awal dengan pesawat komersil. Rencana sebelumnya Menteri Perhubungan juga datang ke Ambon batal,” kata mantan juru bicara Kejati Maluku ini.

Setelah meresmikan JMP, Presiden akan bermalam di Kota Ambon dan besoknya bertolak ke Papua. “Rencana semula Presiden ke Tual dan Maluku Tenggara Barat, tapi batal. Memang tim asase-men sempat ke Tual dan Saumlaki, namun mereka sudah kembali lagi. Jadi untuk jadwal ke Tual dan Saumlaki dibatalkan,” kata sumber Kabar Timur soal pembatalan kunjungan presiden ke Tual dan MTB.

Sementara itu, sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui rilisnya menyebautkan telah menyelesaikan pembangunan enam pelabuhan yang tersebar di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

Keenam pelabuhan ini telah siap beroperasi dan direncanakan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 dan 6 April 2016 di Papua Barat dan Maluku.

“Seluruh pembangunan pelabuhan tersebut dibangun melalui sumber dana APBN Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sampai dengan Tahun Anggaran 2015,” tulis Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, J.A. Barata dalam keterangannya, Minggu (3/4).

Pelabuhan di Provinsi Maluku yang telah selesai dibangun adalah Pelabuhan Tutu Kembong, Pelabuhan Wonreli, dan Pelabuhan Pulau Teor.

Pelabuhan Tutu Kembong merupakan pelabuhan non-komersial yang dibangun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan total pembiayaan Rp 157 miliar. Fasilitas yang dibangun adalah Dermaga seluas 70x8 M2, Trestle seluas 550x6 M2, dan Causeway seluas 310 x 6 M2. Pelabuhan Tutu Kembong memiliki kapasitas dermaga yang baru sebesar 1.000 DWT dengan kedalaman kolam di depan dermaga (Faceline) sebesar 5 mLWS.

Sedangkan fasilitas darat yang dibangun adalah terminal dan kantor seluas 250 M2, bangunan pos jaga 9 M2, dan rumah pompa dan genset 1 unit. Pelabuhan Tutu Kembong yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan pelabuhan pengumpan lokal yang berfungsi sebagai prasarana bongkar muat barang dan penumpang serta sebagai prasarana kapal perintis di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pelabuhan Wonreli mulai dibangun pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2015 dengan total biaya sebesar Rp 54,5 miliar. Fasilitas yang dibangun terdiri dari Dermaga seluas 120x8 M2, Trestle I seluas 68x6 M2, Trestle II seluas 68x6 M2, dan Causeway seluas 250x6 M2. Selain itu, area darat pelabuhan juga dikembangkan untuk lapangan penumpukan barang seluas 2.000 M2, kantor, terminal penumpang seluas 300 M2, pos jaga, genset, gudang, dan area parkir kendaraan.

Pelabuhan Wonreli memiliki kapasitas dermaga yang baru sebesar 1.000 DWT dengan kedalaman kolam di depan dermaga (Faceline) sebesar 6 mLWS. Pelabuhan Wonreli yang berada di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan pelabuhan pengumpan lokal dan berfungsi sebagai prasarana dan sarana transportasi masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Pelabuhan Pulau Teor dibangun sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 dengan biaya sebesar Rp. 42,6 miliar. Fasilitas yang dibangun terdiri dari Dermaga seluas 70x8 M2, Trestle seluas 50x6 M2, dan Reklamasi seluas 100x50 M2. Fasilitas darat yang juga dibangun adalah kantor, gudang dan terminal penumpang. Pelabuhan Pulau Teor yang terletak di Kabupaten Seram Bagian Timur ini memiliki kapasitas dermaga yang baru sebesar 1.000 DWT dengan kedalaman kolam di depan dermaga (Faceline) sebesar 5 mLWS.

Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya hayati laut seperti ikan laut, rumput laut, budidaya air laut dan air payau yang tersebar di perairan laut Seram, Manipa, Buru, Kei Kecil, Kei besar, Yamdena, dan Wetar. Selain itu, Provinsi Maluku juga memiliki potensi wisata budaya dan wisata alam yang secara merata menyebar di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

Sementara pelabuhan di Provinsi Maluku Utara yang juga sudah selesai dibangun yaitu Pelabuhan Tobelo dan Pelabuhan Galela.

Pelabuhan Tobelo dibangun tahun 2008 dan selesai pada tahun 2015 dengan total pembiayaan sebesar Rp 163 miliar. Fasilitas yang dibangun adalah Dermaga General Cargo seluas 174x8 M2, Dermaga Penumpang I seluas 50x10 M2, Dermaga Penumpang II seluas 85x10 M2, Dermaga Peti Kemas II seluas 170x20 M2, Trestle General Cargo seluas 12x6 M2, dan Trestle Peti Kemas seluas 64x10 M2. Selain itu, fasilitas darat yang dibangun adalah Kantor seluas 15x6 M2, Lapangan Penumpukan Barang I seluas 10.118 M2, Lapangan Penumpukan Barang II seluas 20.000 M2, Gudang seluas 10x30 M2, lapangan parkir, pos jaga, jalan induk dan jalan poros.

Pelabuhan Tobelo memiliki kapasitas dermaga yang baru sebesar 10.000 DWT dengan kedalaman kolam di depan dermaga (Faceline) sebesar 10 mLWS. Pelabuhan Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara adalah pelabuhan pengumpul yang berfungsi sebagai prasarana bongkar muat barang dan penumpang di Kabupaten Halmahera Utara.

Pelabuhan Galela mulai dibangun tahun 2006 dan selesai tahun 2015 dengan total pembiayaan sebesar Rp 35,4 miliar. Fasilitas yang dibangun adalah Dermaga seluas 130x8 M2, Causeway seluas 17x6 M2, dan Trestle seluas 28x6 M2. Area darat juga dilakukan pembangunan untuk fasilitas kantor, lapangan penumpukan barang, terminal penumpang 150 m2, bangunan pos jaga, bangunan gudang, bangunan gedung serbaguna (12x8) m2, sarana ibadah (mushola) (8x6) m2, dan lapangan parkir.

Pelabuhan Galela memiliki kapasitas dermaga yang baru sebesar 1.000 DWT dengan kedalaman kolam di depan dermaga (Faceline) sebesar 5 mLWS. Pelabuhan Galela adalah pelabuhan pengumpan lokal yang juga berada di Kabupaten Halmahera Utara dan berfungsi sebagai prasarana dan sarana transportasi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara.

Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan merupakan penghasil kayu terbesar selain potensi perikanan, peternakan, dan perkebunan yang menjadi kekayaan sumber daya alam. Selain itu, potensi wisata alam bahari dan wisata budaya juga menjadi kekayaan khusus Maluku Utara.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Sedangkan di Provinsi Papua Barat, Kemenhub telah selesai membangun Pelabuhan Wasior. Pelabuhan yang berada di Kabupaten Teluk Wondana ini adalah pelabuhan pengumpul yang mulai dibangun sejak tahun 2005 dan selesai pada tahun 2015 dengan biaya Rp 79 miliar. Fasilitas pelabuhan yang dibangun yaitu Dermaga seluas 174x10 M², Trestle I seluas 48x8 M², Trestle II seluas 47x8 M², Causeway I seluas 160x6 M², Causeway II seluas 127x8 M², dan Reklamasi seluas 12.500 M².

Pada area darat pelabuhan juga telah dibangun terminal, pos jaga, rumah pompa dan genset, gudang seluas 15x40 M², dan lapangan penumpukan barang seluas 10.000 M². Saat ini Pelabuhan Wasior memiliki kapasitas dermaga yang baru sebesar 3.500 DWT dengan kedalaman kolam di depan dermaga (Faceline) sebesar 10 mLWS

Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam non-migas seperti sektor perikanan dan peternakan, sektor perkebunan dan kehutanan. Pada sektor wisata Papua Barat memiliki lokasi wisata laut Raja Ampat yang sudah mendunia selain wisata-wisata alam lainnya yang juga menarik untuk dikunjungi di antaranya Taman Nasional Teluk Cendrawasih dan Situs Purbakala Tapurarang.

Pembangunan pelabuhan di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas di wilayah perbatasan, terluar dan wilayah bencana. Hal tersebut sejalan dengan fokus kerja Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana jasa transportasi serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat.

“Pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan tersebut juga merupakan wujud pembangunan yang tidak hanya Jawa sentris akan tetapi pembangunan yang Indonesia sentris, sesuai dengan Nawa Cita pemerintahan Presiden, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Barata. (KTR/DTC)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Selasa, 05 April 2016 06:00

Presiden Berharap JMP Jadi Icon Pariwisata di Ambon



AMBON - Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan pengoperasian Jembatan Merah Putih (JMP) di Kota Ambon, Senin (4/4) sekitar pukul 18.00 Wit.

Pengresmian jembatan terpanjang di Indonesia timur ini ditandai dengan pemukulan tifa oleh Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Muljono, Ketua Komisi V DPR RI, Maykel Wattimena, dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Usai peresmian, Jokowi didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo bersama Gubernur dan Istri, Menteri Basuki, Ketua DPRD Maluku dan Edwin Huwae serta Maykel Wattimena langsung meninjau jembatan tersebut.

Dalam sambutannya presiden berharap agar jembatan merah putih akan menjadi icon pariwisata baru di Maluku khususnya di Kota Ambon.

“Saya harapkan Jembatan Merah Putih ini bisa jadi icon pariwisata baru di Kota Ambon,”kata Jokowi saat menyampaikan sambutannya.

Dia juga mengharapkan agar keberadaan jembatan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Maluku. Dia juga meyakini setiap orang yang datang ke Maluku dapat menikmati keindahan Kota Ambon dari jembatan tersebut.

“Keindahan Kota Ambon khususnya Teluk Ambon dapat dinikmati oleh siapapun yang datang kesini,”katanya.

Senada Gubernur Maluku, Said Assagaff juga menyampaikan sebagai icon baru di Maluku, JMP telah menjadi titian yang mempertemukan dua jazirah di Kabupaten Maluku Tengah dan pusat kota Ambon. Dan dalam terjemahan sosiologis kemudahan tersebut adalah sebuah asa untuk meningkatkan mobilisasi dan interaksi sosial masyarakat di kedua wilayah tersebut.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

“Dengan demikian dalam desain pembangunan manusia maka JMP pun mempermudah akses masyarakat ke sentra pendidikan tinggi yakni Unpatti dan Politeknik Negeri Ambon serta pasilitas militer maupun pemerintahan di Kecamatan Teluk Ambon,”ujarnya.

Menurut Said kehadiran JMP telah mengubah banyak aspek dalam dinaika sosial ekonomi dan pendidikan di Maluku dimana ada sekitar 23 ribu dosen dan mahasiswa tertolong dengan keberadaan JMP.

“Manfaat dari kehadiran JMP ini juga jarak dari bandara Patrtimura ke Ambon yang selama ini ditempuh satu jam dengan memutar teluk Ambon, kini dengan adanya JMP hanya ditempuh kurang lebih 25 menit,”ujarnya.

Pantauan Kabar Timur, pengresmian JMP oleh orang nomor satu di Indonesia ini mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI/Polri. Dari radius satu kilo meter, aparat bersenjata lengkap terlihat bersiaga penuh. Pengamanan semakin di perketat di atas jemabtan, dimana setiap tamu undangan yang masuk harus diperiksa secara ketat melalui metal ditekotor.

Tak hanya diatas jembatan, pengamanan ketat juga dilakukan di bawa jembatan, dimana sejumlah kapal milik TNI AU dan Poloairud ikut dikerahkan untuk melakukan pengamanan. **(KTR)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Lima Saksi Kasus Bank Maluku Diperiksa



AMBON - Pemeriksaan saksi kasus dugaan mark up pengadaan Kantor Cabang PT Bank Maluku-Maluku Utara di Jalan Raya Darmo nomor 51, Surabaya terus berlanjut.

Tim Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku, kemarin memeriksa lima orang saksi. Mereka yang dikorek keterangannya berasal dari internal bank pelat merah tersebut, yakni, mantan Direksi Umum Jainudin Umar Sangaji, Komisariss Izak Saimima, Kepala Devisi Umum Hukum dan Umum Tjince Juanda, mantan Komisariss Johanis Balzeran, dan staf Koperasi Karyawan Bank Maluku Revi Paays.

Pemeriksaan saksi dikebut sejak pagi hingga malam hari di kantor Kejati Maluku di Jalan Sultan Hairun, Ambon.

Dari lima saksi itu dua diantaranya merupakan saksi kunci pembelian kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tahun anggaran 2014, yakni Revi Paays dan Jainudin Umar Sangaji.

Keduanya disebut-sebut mengetahui banyak tentang proses pembelian kantor cabang senilai Rp 54 miliar itu.

Keduanya terlihat mendatangi kantor Kejati Maluku pukul 09.00 WIT. Mereka diperiksa selama delapan jam oleh Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku Ledrik Takandengan dan jaksa penyidik Adam Saimima.

Sementara tiga direksi Bank Maluku, yaitu Izack Saimima, Tjince Juanda, dan Johanis diperiksa sebagai saksi atas tersangka, Direktur Utama PT Bank Maluku, Idris Rolobessy dan Devisi Renstra dan Krose, Pedro Tentua.

“Hari ini (kemarin) lima saksi diperiksa,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Maluku, Samy Sapulete, Jumat (22/4).



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Tjince Juanda usai menjalani pemeriksaan mengatakan, keterangannya yang disampaikan kepada jaksa penyidik masih sama seperti sebelumnya. Dia mengaku memberikan keterangan soal aturan perbankan.

Ditanya awak media, soal peranannya dalam pengadaan kantor cabang Surabaya, Tince mengaku tidak mengetahuinya, sebab baru menduduki jabatan pada Februari 2015.

Saksi lainnya, Jainudin Umar Sangaji mengakui pernah dipanggil Kejati saat kasus ini masih di tahap penyelidikan. “Ini sudah dua kali saya dipanggil, pertama saat kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Dan kini saya kembali dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi,” ujar Jainudin saat dicegat wartawan di depan pintu masuk Kantor Kejati Maluku usai menjalani pemeriksaan.

Jainudin dicerna tiga pertanyaan oleh jaksa penyidik seputar pembelian kantor Bank Maluku cabang Surabaya. “Ada tiga pertanyaan, soal peran dewan komisaris dan persetujuan komisaris terkait pembelian kantor Bank Maluku Cabang Surabaya itu,” ungkap dia.

Sementara Komisaris Bank Maluku, Izak Saimima mengaku dirinya tidak mengetahui, soal pembelian kantor itu, karena belum menjabat sebagai komisaris. “Saya hanya saksi, saat pembelian kantor ini saya belum mengetahui prosesnya,” ujar Saimima kepada wartawan.

Hingga berita ini dibuat, saksi kunci Revi Paays masih menjalani pemeriksaan Kejati Maluku.
(KAF)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Senin, 25 April 2016 06:00

Atasi Macet, 2017 Flyover Dibangun



AMBON - Difungsikannya jembatan merah putih (JMP) tidak hanya membawa dampak positif yakni, pendeknya waktu tempuh dari Desa Poka menuju Galala, tapi juga memberikan imbas pada terjadinya kemacetan di pusat Kota Ambon.

Pasca beroperasinya JMP awal April lalu, kemacetan parah terjadi di ruas jalan Jenderal Sudirman kawasan Batu Merah dan jalan Tulukabessy, Mardika. Kemacetan kendaraan bermotor tidak terhindarkan saat hari kerja, mulai pagi hingga malam hari.

Belum ada solusi pemerintah untuk mengatasi kemacetan ini. Saat ini hanya mengandalkan anggota Satuan Lalulintas untuk buka tutup jalan guna mengurai kemacetan di ruas jalan tersebut. Kemacetan di kawasan Batu Merah dan Mardika baru dapat teratasi di tahun 2017, setelah dibangunnya flyover atau jalan layang.

Rencana pembangunan flyover ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Maluku, Antonius Sihaloho.

Dia memastikan untuk mengatasi kemacetan di kawasan Batu Merah dan Mardika, pemerintah akan membangun flyover. Pembangunan flyover dimulai tahun 2017.

Keberadaan flyover ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera direalisasikan di Ambon. Dengan keberadaan flyover, diharapkan akan mengatasi kemacetan di Ambon.

“Kita akan membangun flyover sebagai upaya mengatasi masalah kemacetan,” ungkap Sihaloho yang dihubungi Kabar Timur, pekan kemarin.

Flyover akan dibangun dari kawasan Batu Merah hingga Karang Panjang. Kendaraan bermotor yang menuju pusat kota akan melintasi flyover. “Itu untuk mengurangi kemacetan di bawah (ruas



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

jalan Jenderal Sudirman) yang selama ini terjadi,” kata Sihaloho yang dihubungi sedang mengikuti Musrebang Nasional di Jakarta.

Perencanaan pembangunan flyover dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara, telah dimulai tahun ini. “(flyover) Lagi didesain. Sepanjang 300-an meter. Mulai dari Batu Merah (makam anak cucu Diponegoro) hingga jalan pertigaan (Rijali) menuju Karpan,” katanya.

Sebelum dibangun, tahap awal akan dilakukan pembebasan lahan terhadap pemukiman warga yang terkena dampak pembangunan flyover. “Sebelum pelaksanaan, diawali dengan pembebasan lahan. Itu tugas Balai Jalan, tapi difasilitasi Pemda sesuai ketentuan. Kalau pembebasan lahan dibawah lima hektar, itu Pemkot bisa fasilitasi,” ujar dia.

Dalam des khusus Maluku pada 3-4 Mei mendatang pembangunan flyover ini akan diangkat dan diusulkan ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. “Nilai anggaran dari APBN, APBD gak mampu. Kita usulkan gunakan APBN. Masih didesain dan dihitung biar akurat, anggaran yang kita usulkan agar tidak (selisih) terlalu jauh (dengan yang disetujui pemerintah pusat). APBN masih terbatas, tapi akan kita dorong ke Pemerintah Pusat,” katanya.

Setelah desain, kata dia, akan dilakukan pembebasan lahan. “Ya kalau desain rampung tahun ini, pembebasan lahan tahun ini juga bisa mulai dilakukan. Setelah selesai baru pengerjaan fisik. Jangan paralel, kadang bisa menimbulkan masalah akan menghambat pembangunan flyover,” kata Sihaloho.

MASIH NEGOSIASI

Sementara itu, salah satu penyebab kemacetan di kawasan Batu Merah dan Mardika karena belum dapat difungsikan underpass atau jalan di bawah jalan di kawasan Tantai (Jalan Jenderal Sudirman), diakui Sihaloho.

Underpass belum bisa difungsikan lantaran keluarga Tutupoho menolak harga tanah yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku. “Pembebasan lahan untuk jalan underpass menggunakan pihak ketiga atau penilai harga tanah. Informasi yang saya peroleh, pemilik lahan meminta harga ganti rugi melebihi dua kali harga pasaran. Harus bisa diselesaikan untuk kepentingan umum, dan masih dalam proses di Balai Jalan dan Jembatan,” imbuh Sihaloho. (KAF)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Selasa, 26 April 2016 06:00

Bakal Ada Dua Atau Tiga Tersangka Baru



PENGEMBANGAN kasus suap proyek jalan di Pulau Seram, Maluku terus berlanjut. Sejumlah pihak akan diperiksa KPK di Mako Brimob Polda Maluku. Mereka memastikan bakal ada dua hingga tiga tersangka baru di kasus ini. Siapa lagi?

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pengeledahan di dua lokasi di Kota Ambon dalam kaitannya dengan pengembangan kasus suap proyek jalan di Pulau Seram, Maluku yang menyeret sejumlah politisi senayan di Jakarta.

Dalam pengeledahan itu, sejumlah dokumen penting berhasil disita KPK dari Kantor Balai Jalan dan Jembatan Nasional (BPJJN) Wilayah IX Maluku-Maluku Utara dan kediaman Amran Mustari.

Kantor BPJJN Wilayah IX Maluku-Maluku Utara di Jalan M. Putuhena kawasan Wailela Kecamatan Teluk Ambon, Senin (25/4) ini, sebelumnya juga digeledah, pada Februari 2016 oleh komisi antirasuah ini. Saat itu, KPK juga melakukan aksi yang sama di kantor dan kediaman Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

Pengeledahan yang dipimpin penyidik KPK, AKBP Hendri Cristian ini terkait kasus suap pengamanan proyek di Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikelola BPPJN Maluku-Malut tahun anggaran 2016.

Delapan penyidik mendatangi Kantor BPJJN sekitar pukul 09.30 Wit, dengan menggunakan tiga mobil Kijang Inova. Setibanya mereka langsung masuk ke dalam kantor dan melakukan pengeledahan dikawal aparat Brimob Polda Maluku bersenjata lengkap. Awalnya, kedatangan tim penyidik KPK untuk melakukan penggeladahan sempat membuat kaget para pegawai BPJJN Maluku-Malut. Meski begitu aktivitas kantor berjalan normal.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Sejumlah ruangan digeledah penyidik KPK mulai dari ruang kerja Amran Mustari yang ada di lantai II kantor BPJJN Maluku-Malut, hingga tiga ruang kerja satuan kerja (Satker) BPJJN wilayah I dan II Maluku yang berada di lantai I.

Selama penggeledahan awak media dilarang meliput oleh Satpam di kantor tersebut. Amran Mustari tidak terlihat selama KPK menggeledah kantornya. Setelah sekitar sembilan jam melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK meninggalkan kantor tersebut. Tiga koper berisi dokumen dan satu map merah disita dalam penggeledahan itu.

Usai penggeledahan di kantor BPJJN, penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di kediaman Amran Mustari yang berada di perumahan elite, Citra Land di kawasan Lateri, Ambon.

“Ada dokumen yang kita sita, DD, EE dan OE. (Setelah menggeledah kantor BPJJN), kita mau ke rumahnya Pak Amran Mustari,” kata AKBP Hendri Christian usai penggeledahan di BPJJN, tadi malam.

Untuk pengembangan kasus, KPK hari ini akan memeriksa sejumlah pihak. “Mulai besok (hari ini) ada pemeriksaan selanjutnya di Mako Brimob Polda Maluku,” kata perwira Polri asal Kabupaten Maluku Barat Daya ini .

Usai penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Ambon, Christian memastikan KPK dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. “Dalam waktu dekat, dua sampai tiga orang akan ditetapkan jadi tersangka,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan Pulau Seram di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, KPK sudah menetapkan lima orang menjadi tersangka. Dua diantaranya merupakan anggota Komisi V DPR, yaitu Budi dan Damayanti dari Fraksi PDIP.

Damayanti diduga menerima SG\$33 ribu pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sementara Budi diduga telah menerima uang sekitar SG\$305 ribu.

Ketiga tersangka lainnya yakni Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir serta dua rekan Damayanti, Dessy A. Edwin serta Julia Prasetyarini.

Dalam perkembangannya, baru Abdul Khoir yang telah disidangkan. Dia didakwa memberi suap kepada pejabat di Kementerian PUPR dan sejumlah anggota Komisi V DPR RI.

Total uang suap yang diberikan Abdul sebesar Rp 21,38 miliar, SG\$1,67 juta, dan US\$72,7 ribu. Suap diberikan oleh Abdul bersama-sama dengan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng dan seorang rekannya yang juga kontraktor asal Maluku.

Sebelum penggeledahan di dua Kota Ambon, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan penggeledahan kali ini dilakukan di BPJJN IX Maluku-Malut. “Pagi ini (kemarin) penyidik KPK melanjutkan penyidikan untuk tersangka BS dengan menggeledah



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

BPJN IX di Jalan M. Putuhena, Wailela, Ambon,” ujar Priharsa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/4) pagi.

Priharsa belum bisa memastikan dokumen dan alat bukti apa yang berhasil diperoleh dalam penggeledahan tersebut. Ia mengaku, penggeledahan untuk mendalami keterlibatan politisi Golkar Budi Supriyanto dalam suap tersebut. Selanjutnya ia juga menampik KPK telah menetapkan tersangka baru dalam suap tersebut. “Sampai saat ini penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut,” katanya. (KTR/CNN)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Rabu, 27 April 2016 20:01

Amran dan Andi Resmi Tersangka



HAMPIR 12 jam lima staf BPJJN Maluku dan Maluku Utara diperiksa penyidik KPK. Pemeriksaan saksi masih dilanjutkan hari ini. Dua orang resmi ditetapkan menjadi tersangka. Siapa mereka?

KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan tersangka baru kasus suap proyek pembangunan jalan Pulau Seram. Dua tersangka itu adalah Kepala Jalan Jembatan Nasional (BPJJN) Maluku-Maluku Utara Amran Mustari dan anggota Komisi V DPR RI, Andi Tofan Tiro.

“Sudah ada tersangka baru, berinsial AM dan ATT. Sudah ditetapkan (tersangka) sejak 20 April lalu,” ungkap penyidik KPK, Hendri Christian yang dihubungi Kabar Timur, tadi malam.

Christian merupakan Ketua Tim Satuan Tugas Khusus (Satgas) yang ditugaskan komisi antirasuah ini melakukan pengeledahan di sejumlah lokasi dan pemeriksaan saksi-saksi di Kota Ambon terkait kasus suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan bertambahnya tersangka, untuk sementara, total tersangka berjumlah tujuh orang. Sebelumnya KPK sudah menetapkan lima orang tersangka, dua diantaranya merupakan anggota Komisi V DPR, yaitu Damayanti dari Fraksi PDIP dan Budi Supriyanto, politisi Golkar. Tersangka lainnya yakni, Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir serta dua rekan Damayanti, Dessy A. Edwin dan Julia Prasetyarini.

Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng alias Frangky Tanaya, yang telah dicegah KPK ke luar negeri, statusnya masih sebagai saksi. Demikian juga Michael Wattimena, anggota Komisi V DPR RI. “Sementara (tersangka baru) masih dua orang. Selama ini kita masih periksa mereka (Aseng dan Wattimena) masih sebagai saksi,” kata Christian.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

DIPERIKSA 12 JAM

Sehari pasca pengeledahan di Kantor BPJJN Maluku-Maluku Utara dan rumah Amran Mustari, KPK kemarin memeriksa sejumlah saksi.

Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Polda Maluku di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon,. Pemeriksaan berlangsung tertutup sehingga menyulitkan wartawan mengabadikan gambar.

Pemeriksaan saksi berlangsung hampir 12 jam, mulai pukul 10.00 WIT hingga mendekati pukul 22.00 WIT.

Pantuan Kabar Timur, satu jam sebelum pemeriksaan, dua mobil Inova yang ditumpangi 8 penyidik KPK tiba di Mako Brimob Polda Maluku. Tak lama sejumlah saksi, mulai terlihat berdatangan ke Mako Brimob dengan menggunakan kendaraan roda empat. Pintu kaca mobil yang tertutup rapat, sehingga tidak diketahui pasti, siapa-siapa yang diperiksa.

Sejumlah mobil plat merah masuk keluar dari Mako Brimob, sejak siang hingga malam hari. Belakangan diketahui mobil dinas itu milik pejabat BPJJN Maluku-Malut.

Siapa saksi-saksi yang diperiksa, Hendri Christian mengatakan, enam orang diperiksa sebagai saksi oleh tim Satgas KPK. Lima diantaranya pejabat BPJJN Maluku-Maluku Utara. Empat diantaranya, Iqbal Tamher, Sutardi, Zadrak alias Cada Ayal, dan Okto. Satu saksi lainnya adalah Lendi Tanaya.

Soal materi pemeriksaan, perwira Polri asal Kabupaten Maluku Barat Daya ini enggan menjelaskan. Begitu juga terkait pemeriksaan terhadap Lendi Tanaya dalam kasus suap ini. "Lendi merupakan saudara Aseng," kata Christian.

Tidak terlihat Kepala BPJJN Maluku-Malut, Amran Mustari dalam "rombongan" saksi yang diperiksa penyidik KPK. "Dia (Amran) tidak diperiksa, mungkin di Ternate," ujar dia.

Christian mengatakan, pengeledahan dan pemeriksaan saksi-saksi di Kota Ambon untuk mendalami keterlibatan Budi Supriyanto dalam kasus suap tersebut.

Di hari yang sama, KPK juga mengirimkan tim Satgas berjumlah 8 orang ke Kota Ternate, Maluku Utara. Di Ternate KPK menggeledah kantor perwakilan BPJJN Maluku-Malut, Senin (25/4) dan dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi, kemarin.

Christian juga tidak dapat memastikan dari sederet saksi yang diperiksa di Ternate, satu diantaranya Amran Mustari. "Agenda tim Satgas sama (dengan di Ambon), kemarin pengeledahan dan hari ini (Selasa), pemeriksaan saksi. Saya tidak tahu apa dia (Amran) diperiksa di Ternate," ujar Christian.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Hari ini, KPK masih melanjutkan pemeriksaan saksi. “Siapa-siapa (saksi yang akan diperiksa) saya tidak hapal karena banyak,” imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, kasus ini terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Damayanti. Dia diduga menerima SG\$33 ribu pada saat OTT dari Abdul Khoir untuk pengamanan proyek jalan di Pulau Seram. Sementara Budi diduga telah menerima uang sekitar SG\$305 ribu.

Total uang suap yang diberikan Abdul sebesar Rp 21,38 miliar, SG\$1,67 juta, dan US\$72,7 ribu. Suap diberikan oleh Abdul bersama-sama dengan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. (KTS)



Jumat, 29 April 2016 08:14

Pekan Depan Giliran Edwin & Sam Diperiksa



PEMERIKSAAN saksi terkait suap pengamanan proyek jalan Pulau Seram dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terus berlanjut.

Setelah memeriksa puluhan saksi di Ambon, Maluku dan Ternate, Maluku Utara, pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan kembali memeriksa sejumlah saksi, pekan depan. Dua saksi diantaranya, Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae dan Wakil Wali Kota Ambon, M.A.S Latuconsina.

Belum diketahui pasti keterkaitan Edwin dan Sam dalam kasus yang telah menjerat tujuh tersangka ini. Surat pemanggilan keduanya telah dilayangkan komisi antirasuah pekan ini.

Sam, sapaan akrab Wawali Ambon yang dikonfirmasi Kabar Timur tadi malam, mengaku telah menerima surat panggilan yang dilayangkan KPK. "Saya dapat informasi KPK sudah dibawa (surat panggilan) ke kantor kemarin (Rabu). Staf di kantor telah menyampaikan kepada saya perihal surat dari KPK," kata Sam yang dihubungi sedang berada di Jakarta.

Sam dijadwalkan diperiksa oleh penyidik KPK pada Rabu 4 Mei 2016 di gedung KPK di Jakarta. Sam mengaku tidak mengetahui kenapa KPK memanggilnya sebagai saksi dan terkait kasus apa. "Atas kasus apa saya dipanggil saya belum tahu. Nanti setelah dipanggil baru saya tahu apa masalahnya," kata dia.

Sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum, Sam memastikan akan memenuhi panggilan lembaga super body tersebut. "Kita dukung (proses hukm), tapi saya tidak tahu kasus ini gimana. Proyeknya jauh di awan-awan, saya tidak tahu dipanggil sebatas apa, nanti setelah dipanggil saya bisa sampaikan," ujar Sam lagi.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Berbeda dengan Sam yang telah memastikan memperoleh surat panggilan dari KPK, Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae, mengaku belum mengetahui dirinya dipanggil KPK. Edwin dijadwalkan diperiksa penyidik KPK pada Selasa, 3 Mei mendatang.

“Saya belum, tahu masih di Jakarta. Dengar-dengar begitu (dilayangkan surat panggilan), tapi saya belum bisa pastikan,” kata Edwin, tadi malam.

Jika akhirnya dipanggil KPK, Edwin akan memenuhi panggilan KPK untuk dikorek keterangannya sebagai saksi. “Saya senang jika memang dipanggil, ini untuk menghindari informasi yang salah dan membias di masyarakat (terkait kasus ini),” tegas dia.

Dia pun menegaskan, tidak ada kaitan dengan kasus suap yang telah menjerat sejumlah politisi Senayan tersebut. Alasannya, DPRD Maluku tidak akan keterkaitan dengan proyek-proyek kementerian yang didanai APBN. “(proyek-proyek APBN) Itu bukan kewenangan kita (melakukan pengawasan). Tapi saya dukung penuh penegakan hukum oleh KPK dalam kasus ini,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Edwin tidak mengetahui kenapa dipanggil KPK untuk diperiksa. Tapi diakui, pernah mendapatkan bantuan dana dari Kepala Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan wilayah IX Maluku-Maluku Utara, Amran Mustary. “Kalau terkait dengan sesuatu memang pernah ada bantuan dari Pak Amran untuk tujuan sosial yaitu kepada panitia pembangunan rumah ibadah tahun kemarin, tapi itu tidak diberikan langsung ke saya,” ungkap Edwin.

Pemanggilan terhadap Edwin dan Sam ini disampaikan penyidik KPK, AKBP Hendrik Christian di Ambon, kemarin (28/4). “Kami telah mengirimkan surat panggilan kepada ketua DPRD Provinsi Maluku dan wakil walikota Ambon untuk diperiksa. Keduanya akan menjalani pemeriksaan di kantor KPK di Jakarta,” kata Christian.

Sementara itu, Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyebutkan belasan saksi telah diperiksa di Mako Brimob Polda Maluku di Kota Ambon, sejak Selasa hingga Kamis (28/4). “Penyidik KPK, kemarin (Kamis) periksa sekitar tujuh orang saksi,” kata Yuyuk yang dihubungi Kabar Timur, tadi malam. Nama-nama saksi lihat tabel.

Sementara itu informasi yang dihimpun Kabar Timur menyebutkan, penyidik KPK yang diketuai Christian juga menyambangi kediaman Hendrik Canon.

Kedatangan tim penyidik KPK ke rumah pengusaha jasa konstruksi itu untuk menyerahkan surat panggilan. Kabarnya Hendrik juga dipanggil sebagai saksi. Namun belum diketahui pasti apakah pemanggilan Hendrik terkait suap proyek Jalan Pulau Seram.

Sebagaimana diketahui dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka. Tiga di antaranya adalah anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar Budi Suprianto, dan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro. KPK juga telah menetapkan Abdul Khoir sebagai tersangka pemberi suap dan Kepala BPJJN Maluku-Maluku Utara sebagai tersangka. (KTS)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR